

**ANALISIS PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA
PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg)**

Oleh :
Alif Farhan Hidayat
NIM.180574201082

Abstrak

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg yang menghukum anak sebagai pelaku kekerasan dengan hukuman melaksanakan pelayanan masyarakat di mesjid Al-Muhajirin dan pelatihan kerja dirumah singgah tepak sirih tidak terlaksanakan, tentu menjadi hal yang harus diperhatikan karena sejatinya apa yang diputuskan hakim haruslah dijalankan oleh pelaku yang diberi hukuman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat yang seharusnya diterapkan kepada anak pelaku kekerasan dan faktor penghambat tidak terlaksananya hukuman tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian terhadap Undang-undang yang dikolaborasikan dengan menidentifikasi hukum serta menganalisa pelaksanaan dengan menggunakan pendekatan kasus dan teori pemidanaan gabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman pelayanan masyarakat hanya sampai pada tahap kedua yakni penyerahan pelaku ke balai pemasyarakatan kelas II Tanjungpinang sedangkan untuk tahap lainnya tidak terlaksanakan yakni penyerahan surat kelokasi, pengantaran pelaku dan pelaksanaan hukuman sehingga tujuan rehabilitasi dan reeduksi dari tujuan pemidanaan tidak tercapai. Tidak terlaksananya hukuman tersebut disebabkan oleh dua faktor penghambat yakni pelaku yang masih menjalani pendidikan formal sehingga sulit membagi waktu, dan tidak ada pedoman pelaksanaan pidana bersyarat sehingga sulit untuk menentukan tata cara pelaksanaan ditambah Tanjungpinang yang baru pertama kali menerapkan pidana bersyarat. Dari kejadian tersebut yang bisa bertanggungjawab ialah kejaksaan karena ia merupakan eksekutor utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kewajiban untuk menekankan pelaksanaan tetapi tidak dijalankan.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Pelayanan Masyarakat, Putusan

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTASI OF THE IMPOSITION OF
COMMUNITY SERVICE CRIMES AGAINST CHILDREN WHO COMMIT
ACTS OF VIOLENCE**

(Stusy of decision number 6/Pid.Sus-children/2022/Pn.Tpg

**By:
Alif Farhan Hidayat
NIM.180574201082**

Abstract

Decision No. 6/Pid.Sus-Children/2022/PNTPg punishes children who are perpetrators of violence with punishments for performing community services at the Al-Muhajirin mosque and providing vocational training at the roof warm Tepak Sirih, of course, this not being done is something to consider because in reality, what the judge decides must be done by the convicted perpetrator. The aim of this study was to understand the implementation of community service punishments that should be applied to children who are perpetrators of violence and the factors that hinder the non-implementation of these punishments. The research method used in this study is the normative empirical method, specifically, the research method is carried out by the method of legal research combined with the determination of the law and the analysis of the implementation by law. using the combined case approach and punishment theory. The results of this study indicate that community service enforcement has only reached the second stage, namely the transfer of perpetrators to Tanjungpinang secondary correctional center, while the other stages are not carried out. Currently, in particular, sending letters to places, delivering prisoners and executing judgments should not achieve the goal of rehabilitation and education compared to the goal of punishment. The non-execution of judgments due to two factors hindering the offender is still in the study period, so it is difficult to allocate time and there is no guidance on conditional judgment execution, so it is difficult to determine the judgment execution proceedings plus Tanjungpinang, the first to apply the conditional judgment. From this case, it can be seen that the procurator is responsible because he is the main executor in the implementation of the court's decisions, which are obliged to enforce but are not allowed to do so.

Keywords: Conditional criminal, Community Obligation, Decision